

LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER SEBAGAI SEBUAH GERAKAN DI ASIA TENGGARA: STUDI KASUS LEGALISASI HAK LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DI THAILAND

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender as A Movement In South Asia: Case Study Of Legalization of Lesbian, Gay, Bisexual And Transgender Rights In Thailand

Nurul Rahmi Aresti

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
nrlrahmi7@gmail.com

Abstract

In March 2015, the Thai parliament issued Gender Equality Act B.E.2558 (2015) which states explicitly "individuals can be a man, woman, or ' someone who has a sexual expression that is different from his sex.'" Although Thai parliament has issued the Gender Equality Act, Thailand's Transgender still faces the most violent discrimination of all LGBT groups in Thailand. The Thai LGBT community needs a special strategy aimed at the Thai government to create a special bill to protect their status and presence in the community through UN organizations namely UNDP and OHCHR. By using feminism, theory of advocacy and theory strategy, this thesis seeks to understand how is the Strategy of the LGBT movement in Thailand and on aspects of international cooperation in encouraging the birth of a Draft Bill on "Third Gender". To find out what strategies the LGBT groups in Thailand used to encourage the birth of a bill, by collaborating between LGBT communities, cooperation with the government and cooperation with international organizations.

Keywords: Discrimination, Gender Equality, LGBT in Thailand, Thailand parliament, UNDP.

Pendahuluan

Negara-negara di Asia Tenggara khususnya Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Myanmar, sebagian Indonesia menganggap perilaku homoseksual adalah tindakan ilegal, namun tidak ada hukum yang tegas tentang LGBT di Filipina dan Indonesia. Sementara Thailand, memberikan perlindungan terhadap ekspresi gender (Carroll, 2016).

Fenomena LGBT ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat yang kontra dan menolak dengan adanya LGBT, memandang hal ini sebagai sesuatu yang menyimpang dan diperlukan terapi untuk menyembuhkannya. Sedangkan, masyarakat yang pro dan mendukung adanya LGBT tidak memandang LGBT sebagai sebuah

penyimpangan seks atau kelainan mental, melainkan dengan menghargai atas dasar kemanusiaan.

Gerakan LGBT tentu tidak dapat menerima jika LGBT dianggap sebagai penyakit sosial, maka mereka bergerak untuk mendapatkan pengakuan HAM sebagaimana mestinya. HAM ini ditujukan untuk mereka yakni kaum LGBT yang menganggap mereka masih mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat karena tidak semua masyarakat di dunia toleran dengan adanya LGBT.

Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki perlindungan terhadap adanya ekspresi gender, namun perilaku LGBT masih mendapat tekanan untuk menjadi warga negara yang baik dan menempatkan kepentingan keluarga diperingkat pertama, dengan anggapan bahwa seksualitas atau gender tidak boleh bertentangan dengan norma yang membawa malu kepada keluarga (Wee, 2014). Tahun 2014, *International Labour Organization* (ILO) juga mencatat bahwa transgender di Thailand menghadapi hambatan untuk mendapatkan pekerjaan saat gender asli mereka berbeda dari penampilan fisik dan perilaku gender mereka (Knight, 2015).

Dilatarbelakangi dengan munculnya stigma ini, LGBT Thailand yang merupakan kelompok minoritas mulai berani untuk menunjukkan eksistensi mereka dan menyuarakan hak-hak mereka dengan seiring dengan perkembangannya zaman yang semakin modern. Salah satunya organisasi lesbian terbesar di Thailand, Anjaree yang berdiri pada tahun 1989 ini dibentuk oleh kelompok kecil para aktivis feminis lesbian, merupakan organisasi lesbian yang bekerjasama dengan organisasi untuk hak perempuan di Thailand. Adanya organisasi ini, mereka dapat berkampanye dihadapan umum agar masyarakat dapat menerima keadaan mereka yang merupakan seorang LGBT dan memperlakukan mereka seperti orang pada umumnya tanpa adanya perasaan bahwa mereka berbeda. Organisasi dan aktivis LGBT bergerak untuk mendapatkan hak yang sama bagi kaum LGBT terutama transgender dalam mendapatkan pekerjaan, edukasi, kesehatan, pernikahan, dan tempat tahanan yang dikhususkan untuk kaum LGBT.

Dalam gerakan LGBT di Asia Tenggara dan khususnya di Thailand, *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *United States Agency for International Development* (USAID) bekerjasama untuk memahami dan menganalisa situasi hak LGBT lewat, “*Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Persons and Civil Society*” yang dimana inisiatif ini dibentuk karena persoalan hak asasi manusia yang menyangkut dengan kaum LGBT di seluruh dunia (UNDP & USAID,

2014). Dengan adanya koneksi, “*Being LGBT in Asia*” ini dapat menjalin hubungan baik dengan organisasi-organisasi LGBT yang ada di setiap kawasan Asia.

Gerakan LGBT yang berada di Thailand selama kurang lebih dua puluh tahun, berjuang untuk mencapai dan mendapatkan persamaan hak asasi bagi kaum LGBT. Pada *Constitution of the Kingdom of Thailand B.E 2550 (2007)* yang disertai pernyataan khusus tentang memberikan ketentuan anti-diskriminasi dalam artikel 30, dilarang adanya diskriminasi atas dasar gender, namun secara implisit tidak mencakup kaum homoseksual, biseksual, hermaprodit, transgender, dan transeksual pasca operasi, sehingga kaum LGBT merasa mereka masih belum mendapatkan hak asasi atas diskriminasi.

Kemudian pada Maret 2015, parlemen Thailand mengeluarkan *Gender Equality Act B.E 2558 (2015)*, yang dideskripsikan oleh aktivis LGBT Thailand sebagai terobosan legislatif dan sebuah kemajuan pada Hak Asasi LGBT di Thailand, serta untuk pertama kalinya hukum di Thailand menyatakan secara eksplisit individu bisa seorang laki-laki, perempuan, atau “seorang yang memiliki ekspresi seksual yang berbeda dari jenis kelamin aslinya” (*Gender Equality Act, 2015*). Undang-Undang tersebut melarang adanya diskriminasi yang didasarkan atas identitas gender dan orientasi seksual dan pelanggaran hukum bisa dikenakan hukuman penjara selama 6 bulan jika mendiskriminasi berbasis gender.

Komunitas transgender menghadapi diskriminasi paling keras dari semua kelompok LGBT dalam hal pekerjaan. Faktanya transgender wanita yang telah melalui prosedur operasi rekonstruksi seksual tidak bisa secara legal mengganti gender dan nama pada dokumen resmi yang menimbulkan permasalahan yang besar bagi komunitas ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, para komunitas LGBT memiliki suatu komitmen dalam mempertahankan aktivitas kehidupan mereka terkait dengan status dan keberadaan mereka di masyarakat melalui suatu gerakan khusus yang ditujukan kepada pemerintahan Thailand untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang khusus melindungi status dan keberadaan mereka di masyarakat. Para kaum LGBT dalam melancarkan upaya tersebut memerlukan suatu strategi khusus agar sasaran dan tujuan mereka yakni terciptanya Rancangan Undang-Undang tentang “Gender Ketiga” dapat terselenggara dengan baik.

Hal ini pun membuat Pemerintah melegalkan hak asasi bagi LGBT di negaranya. Diberlakukannya hak LGBT di Thailand bagi kaum minoritas tersebut untuk menjaga kaum LGBT dari diskriminasi dan dapat merasakan perlindungan hukum yang sama seperti masyarakat lainnya. Dengan ini pun, para aktivis LGBT di Thailand menyambut baik jika

Rancangan Undang-Undang tentang mengakui adanya “gender ketiga” dapat masuk kedalam konstitusi baru (Sari, 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Thailand dalam rangka melindungi keberadaan komunitas LGBT merujuk pada ketetapan United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dimana komunitas LGBT di Thailand merupakan komunitas yang memiliki ekspresi seksual secara khusus yang juga dilindungi oleh United Nations Charter tentang diskriminasi seksual pada pasal satu yang menyatakan bahwa seluruh manusia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang meliputi kebebasan untuk menentukan status politik dan kebebasan memperoleh perkembangan ekonomi, sosial dan budaya.

Pemerintah Thailand merupakan salah satu negara anggota PBB yang melakukan perwujudan dari hak menentukan nasib sendiri, serta menghormati keberadaan hak tersebut sebagaimana ditentukan dalam *United Nations Charter* pasal 26 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, tanpa ada diskriminasi antara yang satu dengan yang lainnya dalam memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, suatu hukum harus melarang segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada suatu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal kebangsaan atau status sosial, kepemilikan, atau status kelahiran dan komunitas LGBT merupakan komunitas yang harus dilindungi status sosialnya oleh pemerintah Thailand.

PBB melalui organisasi *Office of the United Nations High Commissioner For Human Rights* (OHCHR) yang menyatakan bahwa perlindungan keberadaan kaum LGBT merupakan salah bentuk pelaksanaan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dimana keberadaan mereka perlu diawasi dan diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah setempat (United Nations, 2017). Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) merupakan organisasi khusus dari OHCHR yang terlibat khusus pada stigma kaum LGBT dimana organisasi ini memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kaum LGBT dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta sanksi sosial dari masyarakat sekitarnya serta bertanggungjawab dalam mengatasi kasus kesehatan terkait dengan status sosial kaum LGBT yakni penyakit AIDS yang disebabkan oleh HIV. Hal ini berarti bahwa pemerintah Thailand perlu mengadakan kerjasama dengan organisasi OHCHR dan UNDP dalam memberikan perlindungan hukum bagi kaum LGBT di Thailand apabila hingga saat ini Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga yang diajukan oleh kaum LGBT di Thailand belum terbentuk.

Kerangka Teori

Untuk menjelaskan strategi gerakan yang digunakan komunitas LGBT Thailand dan pada aspek kerjasama internasional dalam mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang “Gender Ketiga” di Thailand, penulis menggunakan Feminisme, Teori Advokasi dan Teori Strategi.

Menurut feminisme, perbedaan laki-laki dan perempuan hanya secara segi biologis, bukan secara gender. Karena gender sebenarnya adalah hasil dari konstruksi sosial yang asimetris tentang maskulinitas dan feminitas, yang seharusnya tidak menimbulkan perbedaan diantara keduanya, dalam artian laki-laki dan perempuan (Burchill & Linklater, 1996). Walaupun fokus utama dari feminisme adalah kesetaraan gender, feminisme juga menolak adanya diskriminasi yang ada pada perempuan, bahkan juga mendukung dihapusnya diskriminasi yang dilakukan terhadap kaum LGBT.

Merujuk pada teori feminisme tersebut, masyarakat Thailand sejauh ini saat mendukung kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan namun pada kelompok komunitas lesbian, gay dan biseksual diasumsikan oleh sebagian besar masyarakat Thailand merupakan kelompok atau komunitas yang masih perlu diperhatikan jenis gendernya karena kelompok tersebut masih tetap memperlihatkan sikap dan perilakunya sebagaimana layaknya laki-laki atau perempuan.

Sedangkan kelompok transgender dipandang sebagian besar masyarakat Thailand merupakan kelompok yang memiliki bentuk penampilan fisik yang tidak sesuai dengan fisik alaminya sehingga hal tersebut dirasa sangat mengganggu kehidupan sosial masyarakat Thailand terkait dengan kehidupan berbangsa mereka sehari-hari yang berdasarkan pada norma dan kaidah hukum masyarakat. Hal tersebut menjadi faktor pemicu kaum transgender mendapatkan diskriminasi dari masyarakat Thailand dan memiliki dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap peran dan interaksi sosial kaum transgender di hampir semua aspek kehidupan sosial.

Namun sejauh ini kaum LGBT belum mendapatkan legalitas undang-undang gender ketiga yang diharapkan sehingga mereka harus memperjuangkan aspirasi mereka untuk mewujudkan terciptanya legalitas undang-undang gender ketiga bagi kelangsungan proses sosial mereka.

Kemudian penggunaan teori advokasi, yang merupakan sebuah upaya dalam memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar memiliki kesesuaian dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut (Tomatimasang,

Fakih, & Raharjo, 2000). Tujuan utama dari advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik.

Menurut Laswell, proses kebijakan dapat dibagi ke dalam empat tahapan yang meliputi agenda setting, formulasi kebijakan dan keabsahan, pelaksanaan, dan evaluasi (*the stages model of the policy process*) (Laswell, 1956). Advokasi hanyalah salah satu dari perangkat dan proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam mengawasi serta melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Merujuk pada uraian di atas, pemerintah Thailand dalam rangka mencanangkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga bagi kaum LGBT dapat merujuk pada tahapan yang diperlukan yakni mengadakan agenda setting yang berarti bahwa pemerintah Thailand harus menetapkan beberapa prinsip dan tujuan dari dibentuknya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga bagi kaum LGBT dimana prinsip dan tujuan tersebut harus melibatkan para cendekiawan yang mewakili prinsip masyarakat umum di Thailand serta melibatkan organisasi dunia terkait dengan proses advokasi atau upaya hukum bagi kaum LGBT. Dalam gerakan penghapusan diskriminasi, organisasi yang terlibat memberi masukan adalah UNDP dan OHCHR.

Selanjutnya pemerintah Thailand dapat melakukan formulasi kebijakan dan keabsahan yang berarti bahwa mulai menetapkan beberapa pasal yang diikuti oleh ayat-ayat terkait ketentuan bentuk perlindungan hukum bagi kaum LGBT di Thailand dalam bentuk Rancangan Undang-Undang dan segera mengesahkannya.

Kemudian pemerintah Thailand melakukan pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan melakukan publikasi ke publik melalui pihak-pihak yang berwenang dan melakukan evaluasi terhadap Rancangan Undang-Undang yang telah disusun tersebut dengan mendasarkan pada respon publik serta dampaknya bagi kaum LGBT dan masyarakat Thailand secara umum.

Lalu penggunaan Teori Strategi untuk menggambarkan suatu rencana, taktik atau cara untuk menggambarkan suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal (Rangkuti, 2009).

Merujuk pada pengertian strategi tersebut, kaum LGBT memerlukan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi aktivitas mereka dalam kurun waktu tertentu. Hal ini perlu dilakukan oleh mereka karena strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan mereka yakni segera diberlakukannya Rancangan Undang-Undang “Gender Ketiga.”

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap strategi gerakan yang digunakan komunitas LGBT Thailand dan pada aspek kerjasama internasional dalam mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang “Gender Ketiga”. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*). *Library research* dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan kemudian menganalisisnya. Sumber literatur utamanya berasal dari buku, artikel, jurnal, makalah, surat kabar, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan teori yang digunakan, dapat diketahui bahwa komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender di Thailand seiring dengan pertumbuhan dalam kuantitas atau jumlah penganut LGBT dan terkait dengan perkembangan peradaban hidupnya memunculkan beberapa strategi berupa gerakan atau aksi. Adapun strategi gerakan kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender di Thailand memiliki tujuan untuk mendorong pemerintah Thailand dalam melahirkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga dalam rangka melindungi kehidupan seksual dan sosial di Thailand.

Pertumbuhan Komunitas LGBT DI Thailand

Peristiwa sejarah tentang munculnya LGBT dari jaman kerajaan di Thailand hingga saat ini membuat kaum LGBT menjadi tumbuh berkembang hingga periode sekarang karena diikuti oleh gaya hidup yang mengadopsi budaya Barat sebagai bentuk akulturasi budaya oleh para LGBT hingga pada akhirnya mereka memiliki keberanian untuk mengadakan aksi atau gerakan terkait dengan legalisasi status mereka di Thailand terhadap pemerintah Thailand sehubungan dengan status hukum mereka yang diaktualisasikan melalui Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga.

Beberapa komunitas LGBT di Thailand yaitu Anjaree, Sapaan, Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT), Bangkok Rainbow, dan Thai Transgender Alliance, merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian publik hampir di seluruh dunia

terkait dengan sejarah munculnya mereka pada beberapa abad yang lalu hingga periode saat ini.

Perkembangan jumlah kaum LGBT di Thailand yang semakin subur selain dipengaruhi oleh sejarah juga tidak terlepas dari peran Organisasi Perdamaian Bangsa-Bangsa yang saat ini telah menyatakan bahwa LGBT merupakan salah satu perwujudan dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi hak-hak sosialnya (United Nations, 2011).

Hal ini menjadi suatu senjata bagi kaum LGBT di Thailand untuk lebih percaya diri dalam melakukan gerakan atau aksi mereka untuk mendorong pemerintah Thailand untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga sebagai upayanya dalam melindungi keberadaan mereka di Thailand.

Strategi Gerakan Kaum LGBT di Thailand

Bekerjasama antar komunitas LGBT pada saat melakukan kegiatan kampanye anti diskriminasi terhadap ekspresi seksual mereka di Thailand.

Seiring dengan tumbuh kembangnya jumlah LGBT di Thailand, beberapa komunitas LGBT seperti Anjaree, Sapaan, Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT), Bangkok Rainbow, dan Thai Transgender Alliance menjalin kerjasama yang erat satu sama lain saat melakukan kampanye anti diskriminasi terhadap ekspresi seksual mereka di Thailand.

Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi yang semarak dan penuh antusias dalam memancing perhatian masyarakat pada umumnya mengingat bahwa sebagian besar orang Thai masih belum menerima keberadaan mereka (Jackson, 2011). Di satu sisi, segala bentuk diskriminasi masih dialami oleh komunitas LGBT seperti kesempatan mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dimana beberapa pekerjaan akademis dan non akademis masih sulit untuk ditempati oleh komunitas LGBT (Suriyasarn, 2014).

Salah satu kelompok koalisi LGBT yang lebih besar seperti UNAIDS Asia Pacific, UNESCO Asia Pacific, APCOM, Youth Voices Count and Youth Lead yang mengadakan kampanye dengan label "School Rainbow" yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2014 di mana aksi ini berguna untuk mendorong masyarakat secara bersama-sama menggambar pelangi sebagai karya seni menggunakan kapur di ruang kota yang melambangkan pentingnya keragaman dan penggunaan ruang publik. Hasil karya seni tersebut diletakkan di gerbang sekolah dan tempat-tempat lain di mana anak-anak muda cenderung berkumpul dengan perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya dengan para siswa, sekolah, dan komunitas lokal. Aksi ini juga membawa 'pelangi ke ruang kelas' dengan dukungan pelajaran tentang keragaman seksual, penerimaan, dan hak atas pendidikan.

Salah satu aksi LGBT yang melibatkan tempat pendidikan, pada tanggal 17 Mei 2014, Anjaree mengadakan aksi '*Power Rainbow Workshop*' untuk pemuda terutama pelajar sekolah menengah serta mahasiswa di Pusat Seni dan Budaya Bangkok. Aksi juga menjadi forum bagi siswa LGBT untuk bertukar cerita tentang kehidupan sekolah mereka serta bagi para pendidik dan siswa dalam mendiskusikan bagaimana mengurangi kekerasan serta praktik diskriminatif dalam lingkungan sekolah khususnya, dan dalam masyarakat Thailand pada umumnya (IDAHO, 2014).

Beberapa kampus di Thailand juga menilai bahwa komunitas LGBT dapat merusak generasi bangsa karena dipandang sebagai komunitas yang tidak memiliki masa depan untuk memajukan bangsa dimana pendidikan hanya digunakan oleh komunitas LGBT untuk sekedar mencari ilmu pengetahuan namun kurang diterapkan dalam kehidupan yang normal seperti dibawa dalam suatu pernikahan yang suci antara laki-laki dan perempuan dan diteruskan pada generasi muda berikutnya.

Bentuk diskriminasi selanjutnya adalah pada aspek kesehatan dimana beberapa institusi kesehatan seperti rumah sakit atau yang sejenisnya tidak menerima pasien dari komunitas LGBT terkait dengan penularan HIV AIDS yang diderita oleh komunitas LGBT terhadap pasien lainnya sehingga institusi membentuk perlindungan yang kuat terhadap para pasien yang berasal dari komunitas LGBT (UNDP & USAID, 2014). Selanjutnya komunitas LGBT juga menerima diskriminasi dalam bentuk standar kualitas pelayanan kesehatan yang lebih rendah dari kaum normal dimana mereka mendapatkan perlakuan yang kurang sesuai standar rumah sakit terhadap pasien dari para tenaga medis yakni kurang memperhatikan kebutuhan fisik dan psikologisnya yang lemah saat sakit.

Beberapa diskriminasi tersebut sering mereka alami hingga saat ini sehingga kampanye anti diskriminasi perlu mereka adakan untuk memperoleh hak-hak tersebut yang mereka serukan tiap waktu baik kampanye yang bersifat langsung maupun tidak langsung melalui media sosial dengan harapan untuk menyadarkan masyarakat Thailand bahwa tidak ada kaitan secara spesifik antara hak-hak tersebut dengan status LGBT.

Status hak komunitas LGBT di Thailand tersebut juga disuarakan melalui penggunaan teknologi informasi sebagai sarana media untuk memperoleh pengakuan publik dan menjaring jumlah anggota LGBT serta membuat pamflet yang berisi tuntutan kepada pemerintah Thailand untuk melegalkan orientasi seksual mereka melalui penciptaan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga (UNDP & USAID, 2014, hal. 43).

Komunitas LGBT di Thailand diketahui dalam melakukan aksinya untuk mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga adalah dengan menciptakan web site

yang berisikan berbagai situs terkait dengan kebebasan ekspresi seksual komunitas LGBT di Thailand beserta tuntutan-tuntutannya pada pemerintah Thailand yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia serta dalam rangka menjaring jumlah komunitas LGBT di Thailand sehingga para LGBT yang ingin menyampaikan pendapatnya dapat bergabung dengan komunitas LGBT yang telah terorganisir tanpa merasa takut terhadap tekanan sosial sekitarnya.

Selanjutnya adalah media wisata online yakni Travel Gay Asia dimana media tersebut merupakan sarana hiburan wisata bagi para Gay untuk melakukan perjalanan wisata melalui biro khusus Gay yang diadakan di Thailand. Obyek wisata yang ditawarkan meliputi berbagai tempat di seluruh Asia Pasifik dengan pilihan paket tertentu meliputi fasilitas hotel, kuliner, belanja atau shopping dan transportasi udara, laut serta darat. Hingga saat ini, Travel Gay Asia mendapatkan respon yang positif dari para gay di Thailand dan memiliki konsumen yang makin bertambah dari waktu ke waktu. Media wisata ini juga memancing perhatian para Thai serta masyarakat Thailand secara umum dan pemerintah Thailand dengan memberikan ijin penyelenggaraan.

Komunitas LGBT di Thailand juga memproduksi media online untuk situs hiburan berupa film, sinematografi, dan film dokumenter yang diprakarsai oleh berbagai perusahaan perfilman seperti Sahamongkol Film International, GMM, Come On Sweet (TH), dan lain-lain dimana film tersebut juga berisikan tentang kehidupan Gay, Lesbian, Transgender dan Biseksual yang mendapatkan diskriminasi sosial dari lingkungan keluarga dan masyarakat Thailand namun mereka tetap bersikukuh mempertahankan keberadaannya di Thailand. Film-film tersebut juga mengisahkan tentang kebebasan ekspresi seksual para Gay, Lesbian, Transgender dan Biseksual yang mereka perlihatkan di berbagai tempat seperti di sekolah, kampus, kantor, dan tempat lain sehingga mampu menarik perhatian para penonton (Farmer, 2011). Selanjutnya pemerintah Thailand juga diketahui memberikan ijin penyelenggaraan film-film tersebut sebagai bentuk toleransi terhadap komunitas LGBT di Thailand.

Pemerintah Thailand diketahui juga mulai memberikan respon positif terhadap keberadaan para LGBT terkait dengan aksinya yang makin marak seperti adanya komunitas LGBT yang bekerjasama dengan *Bangkok Metropolitan Administration* dan yayasan Amfar yang bergerak dalam perlindungan hak dan keadilan seksual yakni *Sexual Orientation And Gender Identity* (SOGI) yang di dalamnya juga melibatkan kelompok LGBT yakni Thai Transgender Alliance (Thai TGA).

Mereka juga mengadakan workshop dengan label "*Where Everyone Can Express Themselves*" yang diadakan di Bangkok Art and Cultural Center pada 16 Mei 2014 yang

bertujuan dalam menjelaskan tentang kebebasan dan hak individu transgender Thailand dalam mengakses layanan publik negara, layanan sektor swasta serta pekerjaan. Acara tersebut diketahui dihadiri oleh Wakil Gubernur Bangkok, Dr. Bhoodsadee Tamthai dengan memberikan sambutan pembuka serta menghadirkan para pembicara tamu yakni Sarina Thai, model super trans Thailand dan Poy Treechada dan seorang artis yakni Miss International (IDAHO, 2014).

Selanjutnya, kelompok LGBT di Thailand juga memiliki beberapa organisasi yang diantaranya adalah IDAHOT yang merupakan kepanjangan dari International Day Against Homophobia and Transphobia, di mana didalamnya terdapat beberapa aktivis yang didukung oleh sukarelawan dari Rainbow Sky Association Thailand, Anjaree, Galaya Club, People's Empowerment Foundation, SWING dan The Poz. Kelompok ini memiliki visi dan misi yang berorientasi pada kebebasan berekspresi yang ditunjukkan dalam bentuk kampanye pada tanggal 17 Mei 2014 yakni aksi advokasi media sosial yang pintar dan bebas biaya dengan penekanan kata kebebasan berekspresi yaitu "Ini saya! Inilah kita!". Kampanye ini juga melakukan upacara lilin pada malam hari sebagai penutup (IDAHO, 2014) .

Bekerjasama dengan pemerintah Thailand melalui para parlemen secara perorangan atau kelompok agar mempermudah aksi mereka selanjutnya.

Komunitas LGBT di Thailand bekerjasama dengan *Non-Governmental Organization* (NGO) yaitu lembaga swadaya masyarakat atau suatu organisasi non pemerintah dalam rangka melobi pemerintah Thailand melalui parlemen yakni *Constitution Drafting Assembly* (CDA) yang merupakan badan legislatif di Thailand untuk menyusun Konstitusi Kerajaan Thailand secara permanen. CDA secara konstitusi Thailand dibentuk setelah junta militer merebut kekuasaan di negara tersebut atau dengan alasan kebutuhan untuk menyelesaikan krisis politik di negara Thailand (Sanders, 2011).

Salah satu komunitas LGBT yang memiliki tugas khusus untuk melobi CDA dalam rangka mengesahkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga adalah Anjaree yang mana komunitas ini secara tidak langsung telah menuntut perubahan legislatif dan kebijakan pemerintah Thailand terkait dengan adanya tuntutan kebijakan untuk mengesahkan keberadaan komunitas LGBT sebagai kelompok masyarakat baru yang perlu diperhatikan oleh legislatif sebagai kelompok masyarakat di Thailand sebagai akibat dari perkembangan dunia global.

Salah satu anggota CDA yang menerima lobi dari komunitas LGBT dan NGO untuk mendesak dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga pada CDA adalah Naiyana Suphapung, dimana pada tahun 2007 dia telah menyatakan pada komunitas LGBT di

Thailand untuk segera menindaklanjuti Landasan Hukum yang diperlukan oleh komunitas LGBT untuk melindungi kehidupan mereka nantinya (Sanders, 2011).

Naiyana Suphapung juga merupakan seorang komisioner dari CDA yang memiliki kedekatan yang erat dengan kerajaan Thailand dan bahkan Naiyana Suphapung sendiri juga ditunjuk oleh raja Thailand untuk segera mengatasi polemik sosial yakni pengakuan keberadaan LGBT oleh komunitas LGBT di Thailand (Sanders, 2011).

Naiyana Suphapung selanjutnya membentuk komisi darurat untuk penyelesaian kasus diskriminasi sosial terhadap komunitas LGBT sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di Thailand. Naiyana Suphapung pada bulan November 2011 melalui komisinya pernah melakukan dialog secara khusus terhadap para Lesbian yakni dari komunitas Anjaree melalui seminar. Seminar ini menghasilkan sebuah artikel di media massa Thailand yakni mengenai penghentian kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Komisaris Naiyana jelas telah meramalkan peran untuk isu-isu LGBT dan organisasi dalam pekerjaan merevisi konstitusi, menyebutkan ini sedini Januari 2007 di pertemuan dewan Bangkok Pride (Sanders, 2011).

Naiyana Suphapung telah memainkan peran ganda dengan memfasilitasi pembentukan Jaringan Keanekaragaman Seksual dan menyarankan agenda melobinya sehingga Naiyana mendapat dukungan dari anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lainnya. Komisi ini berkomitmen untuk memainkan peran aktif dalam konsultasi publik mengenai revisi konstitusi, serta melobi isu-isu LGBT menjadi proyek bersama di komisi tersebut.

Selanjutnya Anjaree dalam melobi sistem parlemen juga bekerjasama dengan universitas Mahidol dan Thammasat di Thailand yakni kegiatan jurnalisme yakni penciptaan artikel Bangkok Post yang membahas tentang pemberian kebebasan bagi kehidupan LGBT di Thailand sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia namun hal ini memuat pro dan kontra dari masyarakat Thailand dimana sebagian besar tidak setuju akan keberadaan LGBT di Thailand yang dipandang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarkan pada unsur spiritual serta budaya Thailand.

Pada pertengahan tahun 2007, komunitas LGBT di Thailand juga telah melakukan lobi politik terhadap pemerintah Thailand dengan membentuk komunitas yang bernama "*Sexual Diversity Network*" yakni berupa pengajuan pengakuan kepada pemerintah Thailand untuk menerima komunitas LGBT sebagai kelompok seksual yang berbeda dengan masyarakat Thailand yang lain (Sanders, 2011).

Sexual Diversity Network ini menghasilkan beberapa ketentuan yakni sponsorship, pengakuan, dan perlindungan para pemimpin dan organisasi tertentu terhadap keberadaan LGBT di Thailand dan upaya untuk menyatukan beragam kelompok LGBT dan aktivis dari semua bagian negara, terutama pada lokakarya tentang hak-hak seksual pada bulan April 2007 (Sanders, 2011).

Para komunitas LGBT di Thailand juga melakukan komunikasi dengan anggota CDA yakni parlemen di Thailand terkait dengan beberapa poin atau hal-hal yang menjadi tuntutan mereka pada Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga meliputi anti diskriminasi sosial serta perlindungan hak-hak mereka yang sama dengan kaum non LGBT oleh pemerintah Thailand (UNDP & USAID, 2014).

Beberapa tuntutan yang diajukan komunitas LGBT dan diprakarsai oleh Anjana Suvarnanda sebagai pendiri Anjaree terhadap isi Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga pada CDA meliputi berbagai aspek seperti pada aspek pendidikan dimana mereka menuntut persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan formal dan informal di Thailand tanpa disudutkan terkait dengan statusnya yang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (UNDP & USAID, 2014).

Selanjutnya mereka juga menuntut adanya hak untuk tetap menjalankan ibadah agamanya terlepas dari peraturan bahwa umat beragama tidak hanya pada para umat yang bukan kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender karena menjalankan ibadah adalah salah satu poin dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Kemudian tuntutan atas kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan atau mendirikan usaha yang sama dengan komunitas non LGBT karena hal itu merupakan salah satu perwujudan dalam Hak Asasi Manusia (UNDP & USAID, 2014).

Komunitas LGBT juga menuntut persamaan hak antara peran laki-laki dan perempuan yang mereka terapkan sesuai statusnya sebagai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dengan pasangannya.

Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga juga harus mendukung hak-hak para Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender untuk melakukan aktivitas kehidupan kesehariannya tanpa adanya diskriminasi dan kriminalisasi dari masyarakat Thai selagi tidak merugikan secara fisik dan psikologis bagi orang lain.

Kelompok LGBT yakni Rainbow Sky yang diprakarsai oleh Kittinan Tharamatat juga membentuk kelompok advokasi untuk hak gay yang mengatakan bahwa jika piagam baru untuk mengakui seksualitas yang beragam dan mengamanatkan persamaan hak untuk

komunitas gay dimana hal tersebut harus ada dalam poin Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga (Ammon, 2007).

Pembicaraan dengan anggota CDA yang diadakan oleh komunitas LGBT juga membahas tentang Undang-undang pemerkosaan, yang saat ini hanya melindungi korban perempuan, misalnya, harus diubah untuk melindungi laki-laki, homoseksual dan juga transgender (Ammon, 2007).

Selanjutnya kaum LGBT juga menuntut untuk dilegalkannya pernikahan sesama jenis, sehingga memungkinkan mitra homoseksual, biseksual dan transgender memiliki hak waris dari pasangannya dan di datu sisi, mereka juga menuntut untuk diberi hak dalam mengadopsi anak untuk melengkapi kehidupan pernikahan mereka (Laohong & Sabpaitoon, 2018).

Beberapa tuntutan tersebut mereka ajukan pada anggota parlemen yakni CDA untuk menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial antara masyarakat sekitar dan keluarga untuk mendukung ketentuan anti-diskriminasi dalam rancangan konstitusi karena meskipun Thailand secara luas telah toleran terhadap kaum gay, waria dan transseksual yang memiliki kehadiran reguler di TV, di film dan bisnis hiburan namun masih banyak yang menghadapi tekanan keluarga, prasangka sosial dan kekerasan dalam rumah tangga hal ini perlu dipertimbangkan oleh Dewan Legislatif Nasional (*National Legislative Assembly*).

Bekerjasama melalui komunikasi yang intensif terhadap Organisasi dunia

Bekerjasama melalui komunikasi yang intensif terhadap Organisasi Internasional PBB dengan OHCHR terkait dengan proses legalisasi Hak Asasi Manusia atas status sosial mereka serta bekerjasama dengan UNDP terkait dengan perlindungan hukum keberadaan mereka di Thailand (OHCHR, 2017; UNDP & USAID, 2014).

Gerakan komunitas LGBT di Thailand juga mendapat perhatian dari Organisasi untuk perdamaian dunia yakni PBB dimana melalui OHCHR telah mendukung keberadaan LGBT di Thailand sebagai salah satu perwujudan dari hak asasi manusia dalam mengekspresikan seksual mereka (Kaleidoscope Human Rights Foundation, 2016).

Hal ini mempermudah komunitas LGBT untuk melakukan strategi gerakannya yakni dengan menjalin komunikasi yang intensif dengan OHCHR melalui pembicaraan langsung dan dengan perantara NGO terkait dengan segala kondisi dan situasi yang mereka alami di Thailand terkait dengan diskriminasi sosialnya di berbagai aspek kehidupan sehingga menghasilkan imbauan dari OHCHR dalam bentuk rekomendasi untuk menghargai hak-hak seksual para LGBT dan segera membentuk peraturan tertulis dalam bentuk landasan hukum

pada pemerintah sehubungan dengan perlindungan komunitas LGBT di Thailand (OHCHR, 2017).

Komunitas LGBT juga telah meminta OHCHR untuk turun langsung ke Thailand sebagai perwujudannya dalam menciptakan kedamaian dunia sehubungan dengan peran OHCHR untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan LGBT di Thailand sehingga menghasilkan keputusan tertulis dari pihak OHCHR pada pemerintah Thailand untuk memberikan perlindungan hukum pada komunitas LGBT melalui beberapa teknik organisasi yakni membentuk komisi perlindungan publik terhadap kaum LGBT, menciptakan sekretariat jendral untuk menangani polemik keberadaan LGBT. Komunitas LGBT juga meminta OHCHR untuk mengadakan pertemuan khusus dengan pemerintah Thailand terkait dengan polemik LGBT sehingga melibatkan pemerintah Thailand sehubungan dengan penyelesaian konflik LGBT.

Komunitas LGBT juga meminta perlindungan administratif pada OHCHR dalam memberikan perlindungan hukum yakni dengan melakukan pengawasan serta sanksi hukum bagi pemerintah Thailand yang melakukan diskriminasi ataupun kekerasan pada komunitas LGBT dimana dalam merealisasikan perannya secara administratif tersebut, OHCHR telah bekerjasama secara sinergis dengan pemerintah Thailand hingga diciptakannya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga (OHCHR, 2017).

Komunitas LGBT juga meminta OHCHR untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat Thailand melalui perwakilannya di parlemen Thailand selain juga perwakilan dari komunitas LGBT terkait dengan diskriminasi serta kekerasan yang dialami oleh para LGBT. Terkait dengan pertemuan khusus antara OHCHR, pemerintah Thailand, Thai dan LGBT tersebut, hingga saat ini masih belum menghasilkan kesepakatan yang masiv sehubungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah penerimaan golongan masyarakat homogen dimana kelompok masyarakat ini adalah kelompok terbesar di Thailand yang masih menjunjung tinggi peradapan spiritual Budha dan nilai-nilai spiritual sejarah Thailand yang menghadapkan pada keaslian gender dalam interaksi sosial sehari-hari sehingga masih belum dapat sepenuhnya menerima keberadaan LGBT di Thailand.

Selanjutnya komunitas LGBT di Thailand juga bekerjasama dengan OHCHR untuk menghadapi kasus diskriminasi sosial dengan bentuk pengawasan khusus dari OHCHR yang diteruskan dengan lobi politik dengan pemerintah Thailand dalam memberikan perlindungan hukum bagi kaum LGBT serta mendesak untuk segera menciptakan ketentuan hukumnya sehingga menghindarkan komunitas LGBT dari diskriminasi serta kekerasan fisik ataupun psikologis ke depannya.

Komunitas LGBT juga telah menjalin hubungan dengan United Nation Development Program (UNDP) sebagai perpanjangan tangan dari OHCHR untuk memberikan beberapa fasilitas berupa sarana dan prasarana baik terhadap pemerintah Thailand maupun kepada komunitas LGBT itu sendiri sehingga menghasilkan dukungan dari UNDP berupa pemberian dana sebesar 27 miliar rupiah pada tahun 2016 yang diserahkan secara langsung pada pemerintah Thailand untuk memajukan kesejahteraan komunitas LGBT di Thailand serta untuk mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (Hutapea, 2016).

Bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada komunitas LGBT adalah dengan meningkatkan kualitas kesehatannya dan pembangunan fasilitas kesehatan untuk upaya preventif hingga kuratif, kualitas pendidikan berupa pemberian edukasi seksual serta kelayakan pendidikan yakni meningkatkan skill atau keterampilan di berbagai bidang sehingga berguna bagi kehidupan para LGBT di masa mendatang serta penyuluhan kepada para LGBT agar terhindar dari virus HIV/ AIDS yang beresiko diderita oleh komunitas LGBT di Thailand (UNDP & USAID, 2014).

Komunitas LGBT juga meminta pada UNDP untuk bersinergi dengan pemerintah Thailand dalam memberikan sarana berupa media informasi pada para LGBT di Thailand yakni sarana media dengan teknologi informatika untuk menyuarakan aspirasi, pendapat dan ekspresi seksualnya pada khalayak luas (UNDP & USAID, 2014).

Selanjutnya komunitas LGBT juga bekerjasama dengan UNDP dan Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions untuk mendukung hak asasi manusia bagi komunitas LGBT berupa penyelenggaraan sharing hingga perlindungan psikologis serta fisik komunitas LGBT di Thailand terkait dengan dukungan orientasi seksual mereka, identitas seksual, serta perlindungan pada beberapa kelompok lesbian, gay, bisexual, transgender terkait dengan hak-hak mereka di Thailand (OHCHR, 2017).

Kesimpulan

dengan jumlah komunitas LGBT yang besar diketahui bahwa dalam rangka mewujudkan strategi gerakannya untuk mendorong lahirnya rancangan Undang-Undang tentang gender ketiga adalah dengan melakukan gerakan pada ruang lingkup Pemerintah di Thailand yakni dengan kerjasama antar komunitas LGBT dalam bentuk kampanye anti diskriminasi terhadap ekspresi seksual mereka di Thailand pada aspek pendidikan yakni menuntut persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan formal dan informal serta perlindungan bagi homoseksual laki-laki, perempuan dan transgender.

Kelompok LGBT juga bekerjasama dengan pemerintah Thailand melalui parlemen yakni Constitution Drafting Assembly (CDA) untuk menyusun Konstitusi Kerajaan Thailand secara permanen terkait dengan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga. Selanjutnya komunitas LGBT juga bekerjasama dengan Non Governmental Organization (NGO) dalam rangka melobi pemerintah Thailand melalui parlemen yakni Constitution Drafting Assembly (CDA) untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga.

Secara gerakan sosial, komunitas LGBT membentuk relasi publik yakni “Sexual Diversity Network” yakni berupa pengajuan pengakuan kepada pemerintah Thailand untuk menerima komunitas LGBT sebagai kelompok seksual yang berbeda dengan masyarakat Thailand yang lain dengan melibatkan para advokasi yang diprakarsai oleh Kittinan Tharamatat dari Fah Si Roong untuk mengakui seksualitas yang beragam dan mengamanatkan persamaan hak untuk komunitas gay dimana hal tersebut harus ada dalam poin Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga. Mereka juga menciptakan web site terkait dengan kebebasan ekspresi seksual komunitas LGBT di Thailand beserta tuntutan-tuntutannya pada pemerintah Thailand yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia.

Sedangkan secara edukasi, komunitas LGBT diketahui telah bekerjasama dengan universitas Mahidol dan Thammasat di Thailand yakni pada kegiatan jurnalisme dalam penciptaan artikel Bangkok Post yang membahas tentang pemberian kebebasan bagi kehidupan LGBT di Thailand sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia yang juga materi dalam Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga serta mendorong pemerintah Thailand untuk mengeluarkan sanksi hukum bagi masyarakat Thailand atas perlakuan diskriminasi dan kriminalisasi yang dilakukan pada komunitas LGBT.

Komunitas LGBT di Thailand dalam rangka mewujudkan strategi gerakannya untuk mendorong lahirnya rancangan Undang-Undang tentang gender ketiga juga dicapai melalui gerakannya pada ruang lingkup internasional dimana beberapa komunitas seperti Anjaree, Sapaan, Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT), Bangkok Rainbow, dan Thai Transgender Alliance bekerjasama dengan PBB dengan OHCHR terkait dengan proses legalisasi Hak Asasi Manusia atas status mereka dan dengan UNDP untuk perlindungan hukum keberadaan mereka di Thailand dengan perantara NGO. Komunitas LGBT juga meminta OHCHR untuk mengadakan pertemuan khusus dengan pemerintah Thailand terkait dengan polemik LGBT sehingga dapat memberikan perlindungan hukum berupa pengawasan serta sanksi hukum terhadap tindakan diskriminasi seksual dan menjalin hubungan dengan UNDP untuk memajukan kesejahteraan komunitas LGBT di Thailand serta untuk mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender.

Referensi:

Buku:

- Burchill, S., & Linklater, A. (1996). *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Jackson, P. (2011). *Queer Bangkok: 21st century markets, media, and rights*. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Azizah, N. (2013). *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Tomatimasang, R., Fakhri, M., & Raharjo, T. (2000). *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Read Books

Jurnal:

- Numun, W. (2012). Significance of Homosexuality in Thai Society. *Journal of Humanities and Social Sciences*, 8(2), 157-170.
- Waylen, G. (2006). You still don't understand: Why troubled engagement continue between feminist and (critical) IPE. *Review of International Studies*, 32, 145-164

Arsip:

- Gender Equality Act. (8 Maret 2015). *Gender Equality Act, 2015 [B.E. 2558]*. Thailand.
- Carroll, A. (2016). *State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition*. Geneva: ILGA.
- Kaleidoscope Human Rights Foundation. (2016). *Report on Thailand regarding the human rights of LGBTI persons [pdf]*. Thailand: Sexual Rights Initiative.
- Rangkuti, F. (2009). *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta : PT. GramediaPustakaUtama.
- Suriyasarn, B. (2014). *Gender identity and sexual orientation in Thailand [pdf]*. Bangkok: International Labour Organization.
- UNDP, & USAID. (2014). *Being LGBT in Asia: Thailand Country Report [pdf]*. Bangkok: UNDP.
- United Nations. (2011). *Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity*. United Nations.
- United Nations. (11 April 2017). *The Role of the United Nations in Combatting Discrimination and Violence against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People. A Programmatic Overview*, hal. 1-22.

Website:

- Ammon, R. (Juni 2007). *Gay Rights in Thailand*. Dipetik 14 Mei 2018, dari GlobalGayz:
<https://www.globalgayz.com/gay-rights-in-thailand-2007/332/>
- Hutapea, R. U. (12 Februari 2016). *UNDP Kucurkan Rp 108 M Untuk Dukung LGBT di Indonesia dan 3 Negara Asia*. Dipetik 25 April 2018, dari detikNews:
<https://news.detik.com/internasional/3140618/undp-kucurkan-rp-108-m-untuk-dukung-lgbt-di-indonesia-dan-3-negara-asia>
- IDAHO. (4 Juni 2014). *IDAHOT Report 2014: Thailand*. Dipetik August 23, 2018, dari IDAHOT: <https://dayagainsthomophobia.org/idadhot-report-2014-thailand/>
- IDAHO. (3 Mei 2014). *Thailand will celebrate IDAHOT with a series of events*. Dipetik August 22, 2018, dari IDAHOTB: <https://dayagainsthomophobia.org/thailand-will-celebrate-idadhot-with-a-series-of-events/>
- Knight, K. (21 September 2015). *Dispatches: Thailand Acts to End LGBT Discrimination*. Dipetik November 12, 2017, dari Human Rights Watch:
<https://www.hrw.org/news/2015/09/21/dispatches-thailand-acts-end-lgbt-discrimination>
- Laohong, K.-O., & Sabpaitoon, P. (30 April 2018). *Same-sex marriage a must for nation famed for tolerance*. Dipetik Mei 1, 2018, dari Bangkok Post:
<https://www.bangkokpost.com/news/general/1454834/same-sex-marriage-a-must-for-nation-famed-for-tolerance>
- OutRight. (2007, Juli 11). *OutRight - LGBTIQ Human Rights*. Retrieved April 20, 2018, from Thailand: LGBT Activists Fight for Constitutional Protection:
<https://www.outrightinternational.org/content/thailand-lgbt-activists-fight-constitutional-protection>
- Sari, A. P. (Januari 2015). *Thailand Akan Akui Gender Ketiga*. Dipetik September 21, 2017, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150115175756-106-24997/thailand-akan-akui-gender-ketiga?>
- Soepiadhy, S. (2011, Oktober 26). *Perubahan Konstitusi di Thailand*. Retrieved April 10, 2018, from
http://www.surabayapagi.com/read/72694/2011/10/26/Perubahan_Konstitusi_di_Thailand.html
- Wee, D. (18 September 2014). *Thailand gays face stigma despite high visibility*. Dipetik November 12, 2017, dari Gay Star News:

<https://www.gaystarnews.com/article/thailand-gays-face-stigma-despite-high-visibility180914/#sthash.YvKayXHS.dpuf>

Yongstar, S. (2015, November). Changing Political Tides: The LGBT Movement in Thailand and the Difficult Struggle toward Gender Diversity. Retrieved Mei 1, 2018, from The Gender Issue Gender Politics in Asia - Heinrich-Böll-Stiftung:

https://www.boell.de/sites/default/files/perspectives-asia_4_the_gender_issue_en.pdf